

Bab 3 Stagnasi Pengembangan Postur Pertahanan Indonesia periode 2001-2004

Bab ini membahas, pertama, tingkat pengembangan atau modernisasi postur pertahanan Indonesia periode 2001-2004. Kedua, bagaimana sikap responsif Indonesia dalam memaknai perubahan di lingkungan strategisnya. Ketiga, bagaimana Indonesia memahami faktor sebab-akibat yang mempengaruhi perkembangan postur pertahanan dalam menghadapi ancaman dan persaingan. Analisa perkembangan postur pertahanan ini akan mengaplikasikan pemikiran Stephen van Evera untuk memahami postur pertahanan sebuah negara. Pemikiran ini menggunakan beberapa faktor eksplanatif untuk menjelaskan apakah postur pertahanan sebuah negara dapat dikatakan merefleksi atau merespon perubahan lingkungan strategis atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi postur pertahanan adalah faktor militer, faktor geografis, faktor diplomasi, dan faktor rezim politik.

Bab ini menyoroti kondisi postur pertahanan Indonesia berdasarkan empat faktor yang dikembangkan oleh van Evera. Faktor militer yang mempengaruhi pengembangan postur pertahanan akan diklasifikasi berdasarkan kemampuan pengembangan persenjataan yang didukung oleh realitas besaran anggaran pertahanan. Faktor geografis yang secara normatif akan menentukan gelar pasukan yang disesuaikan dengan situasi lingkungan strategis dan kondisi geografis Indonesia. Faktor diplomasi akan menentukan bagaimana langkah kebijakan Indonesia dalam memperkuat pertahanan negaranya yang mengarah pada keterlibatan Indonesia dalam membangun hubungan antarnegara dalam kerangka pengaturan keamanan melalui mekanisme diplomasi pertahanan pada periode 2001-2004.

Di tesis ini, faktor rezim politik bersifat konstanta mengingat proses peralihan kepemimpinan dari Abdurrahman Wahid kepada Megawati tidak memberikan perubahan kebijakan. Rezim politik di awal kepemimpinan Abdurrahman Wahid tahun 1999 (periode reformasi) memulai kebijakan sentiment anti militernya dengan menarik militer keluar dari zona politik, sehingga fungsi militer di pemerintahan dan birokrasi ditiadakan. Awal kepemimpinan Megawati pada tahun 2002, juga ditujukan

untuk meneruskan kebijakan pendahulunya untuk menciptakan militer yang profesional dengan tidak memberikan ruang gerak pada militer untuk bermain di ranah politik.¹

1.1 Stagnasi Kemampuan Teknologi Militer (Alutsista) dan Kekuatan Militer (Prajurit dan Alokasi Anggaran Pertahanan) Indonesia periode 2001-2004

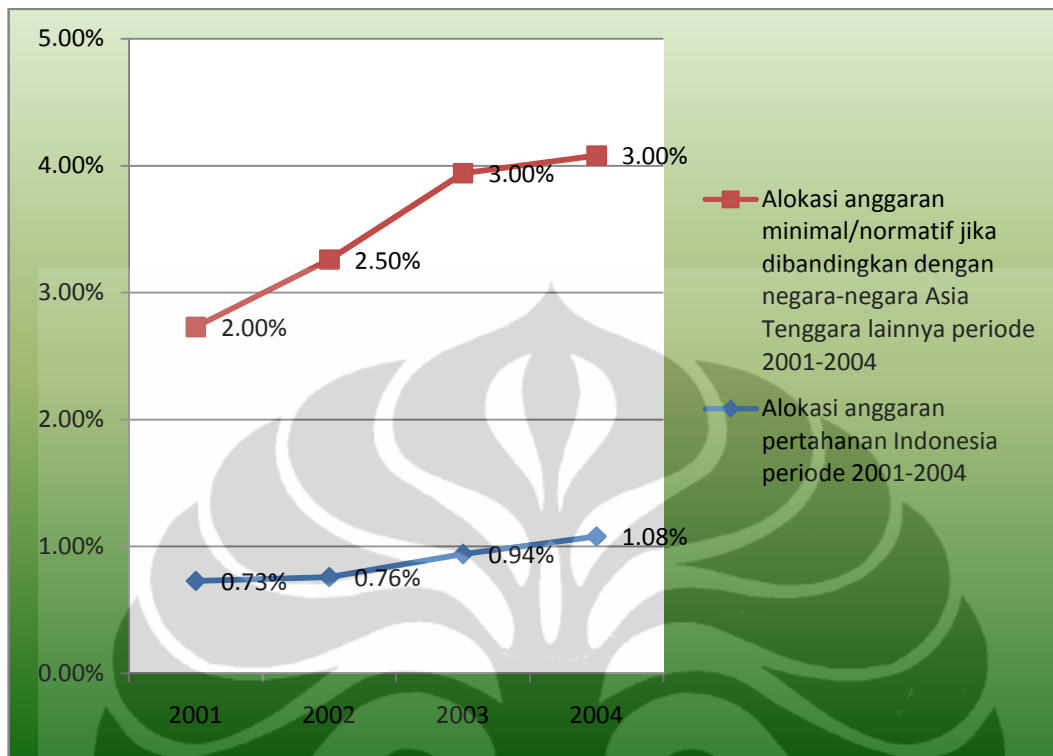
Pengembangan postur pertahanan Indonesia dihadapkan pada permasalahan klasik, yaitu lemahnya dukungan anggaran pertahanan. Dukungan anggaran yang dinilai sebagai penopang dari pengembangan postur pertahanan menjadi permasalahan tersendiri, meskipun faktor dukungan anggaran bukan satu-satunya faktor dalam melakukan pengembangan postur pertahanan. Dalam kurun waktu 2001-2004, alokasi anggaran pertahanan Indonesia dapat digolongkan sangat kecil. Selama ini, kemampuan Indonesia dalam mengalokasikan anggaran pertahanan rata-rata pertahun di bawah 1% dari produk domestik bruto (PDB).² Jumlah alokasi anggaran ini tentu saja masih jauh di bawah harapan mengingat lingkungan strategis Indonesia pada periode 2001-2004 memberi gambaran jelas bahwa banyak negara-negara di kawasan ini, terutama negara-negara yang justru memiliki batas teritorial langsung dengan Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia yang terus melakukan modernisasi kekuatan militernya. Sebaliknya, jumlah alokasi anggaran pertahanan tersebut membuat Indonesia sangat sulit untuk melakukan modernisasi postur pertahanan yang dapat merefleksi perubahan di lingkungan strategisnya. Alokasi anggaran tersebut sama sekali tidak memberikan perubahan berarti terhadap kondisi kekuatan pertahanan Indonesia. Sebagai pembanding, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, pada umumnya, mengalokasikan 4-5% dari PDB-nya untuk pembangunan kekuatan militer.³ Berikut bagan penjelasan yang memberikan gambaran alokasi anggaran pertahanan Indonesia (grafik 3.1):

¹ Leonard Sebastian, *Realpolitik Ideology: Indonesia's Use of Force*, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies (ISEAS), 2006, h. 329-337

² Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003, *loc. cit*, h. 12

³ *Ibid*

Grafik 3.1: Alokasi Anggaran Pertahanan Indonesia berdasarkan PDB periode 2001-2004



*Sumber Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Pertahanan Indonesia, dalam Monograph No. 10, 10 November 2007, Propatria Institute: Working Group on Security Sector Reform; Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia: *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, 2003.⁴

Grafik di atas mengenai alokasi anggaran pertahanan Indonesia periode 2001-2004, secara kuantitatif, menjelaskan bahwa pada tahun 2001, Indonesia hanya mampu menyuplai dana untuk pembangunan pertahanan sebesar 0,73%. Tahun 2002, kenaikan anggaran hanya sebesar 0,3% atau sebesar 0,76%. Tahun 2003 kenaikan anggaran pertahanan belum begitu signifikan, yaitu hanya menjadi 0,94%, begitupun sampai dengan tahun 2004 dimana anggaran pertahanan hanya mampu menyuplai 1,08%. Grafik tersebut menjelaskan bahwa adanya kenaikan, namun tingkat persentase kenaikan anggaran pertahanan per tahun sama sekali tidak mempengaruhi kondisi kekuatan pertahanan Indonesia. Tingkat kenaikan anggaran pertahanan belum mampu menyuplai pemenuhan akuisisi alutsista dan bahkan, tingkat kenaikan

⁴ Lihat Sumber Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Pertahanan Indonesia, *loc. cit*, h. 16; Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003, *loc. cit*

anggaran masih jauh tertinggal dengan negara-negara lain di kawasan. Kondisi ini belum memungkinkan bagi Indonesia untuk membangun kekuatan militer yang sesuai dengan bentuk *balancing* kekuatan seperti yang dilakukan negara-negara lain. Grafik di atas menjelaskan kenaikan anggaran pertahanan Indonesia masih belum dapat mempersempit jarak anggaran pertahanan yang secara normatif mesti dilakukan Indonesia untuk mengimbangi alokasi anggaran seperti yang dilakukan negara-negara lain di kawasan. Perbandingan kesenjangan strategis alokasi anggaran yang seharusnya dilakukan Indonesia dengan realitas alokasi anggaran yang ada mencerminkan ketertinggalan Indonesia dalam melakukan pemenuhan kapabilitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas alutsista yang semestinya didukung oleh besaran anggaran. Karena itu, anggaran pertahanan akan memainkan peranan yang cukup signifikan jika pemenuhan alokasi anggaran pertahanan sesuai dengan alokasi anggaran normatif. Pemenuhan anggaran yang sesuai dengan skala minimal setidaknya akan menjadi langkah *balancing* dan memberikan ruang gerak bagi kesiapan material dan alutsista yang lebih baik.

Keterbatasan kemampuan dan dukungan alokasi anggaran pertahanan yang hanya sedikit mengalami kenaikan sangat mempengaruhi ruang gerak Indonesia dalam memenuhi tuntutan atau kebutuhan dalam mengembangkan postur pertahanan atau untuk melakukan pengimbangan kekuatan negara-negara yang terus melakukan modernisasi kekuatan militernya. Hal itu tentu saja berdampak pada kondisi kekuatan militer Indonesia yang semakin tertinggal dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam bidang teknologi alutsista. Peranan teknologi dalam membentuk kesiapan alutsista telah memberikan perubahan-perubahan dalam bidang militer, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Teknologi yang diadaptasi sebuah negara untuk kepentingan strategi militer memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun postur pertahanan, baik sebagai proteksi, mobilitas, komunikasi, dan intelijen.⁵ Karena itu, sebuah negara perlu memahami signifikansi dan fungsi teknologi dalam mengaplikaskannya ke dalam pengembangan postur pertahanan,

⁵ Barry Buzan, *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*, London: The Macmillan Press Ltd, 1994, hal. 21-26

karena teknologi menentukan kelanjutan pembangunan kekuatan militer yang terus mengalami perubahan.⁶ Dalam kasus Indonesia, pengembangan teknologi alutsista Kondisi kesiapan material dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di tiap matra, baik dari segi kualitas dan kuantitas, belum memenuhi kebutuhan sesuai TOP/DSPP (Tabel Organisasi dan Perlengkapan/Daftar Susunan Personel dan Peralatan).⁷ Alutsista dan material yang ada pada umumnya sudah sangat tua. Sejauh ini TNI terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan kondisi material yang ada agar tetap dapat dimanfaatkan, antara lain melalui pemeliharaan dan perbaikan. Namun beberapa jenis material tidak mungkin lagi diperpanjang usia pakainya, sehingga berakibat pada berkurangnya jumlah kekuatan.⁸ Berikut tabel penjelasannya (tabel 3.1):

Tabel 3.1: Kesiapan Personel dan Alutsista Indonesia berdasarkan TOP/DSPP dan Kondisi Nyata di Lapangan

Matra	Personel	Alutsista	Tingkat Kesiapan Alutsista
AD	Kostrad: 97%	Kendaraan Tempur 872 unit	71, 79%
	Kopassus: 100%	Kendaraan Motor 25.716 unit	85, 04%
	Kodam: 97%	Pesawat Terbang 61 unit	53, 51%
AL	Marinir 55%	Kapal Perang (KRI) 133 unit	50, 82%
		Kendaraan Tempur marinir 435 unit	36, 09%
		Pesawat Terbang 71	52%

⁶ *Ibid.* Hal. 109

⁷ Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003, *loc. cit.*, h. 89

⁸ *Ibid*

		unit	
AU		Pesawat Terbang 251 unit	45, 82%
		Radar 16 unit	18, 75%

*Sumber diolah dari berbagai literatur, seperti Pokja Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, *Konsepsi Postur Pertahanan Negara 2004-2014*; Alexandra R. Wulan (ed), *Satu Dekade Reformasi Militer Indonesia*, Indonesia: Pacivis Universitas Indonesia dan Friedrich-Ebert_Stiftung Indonesia Office, 2008; Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007. Hal. 40.⁹

Pada kenyataannya, Indonesia hanya mampu memenuhi kebutuhan alutsista yang sama sekali tidak berdasarkan pada kebutuhan yang sesuai TOP/DSPP. Pengembangan alutsista tidak mengalami peningkatan signifikan, bahkan cenderung stagnan. Stagnasi pengembangan kekuatan militer Indonesia akan menggambarkan bahwa pengembangan postur pertahanan sama sekali belum merefleksi ancaman eksternal dan persaingan di kawasan. Berikut tabel yang menampilkan kekuatan prajurit dan alutsista postur pertahanan Indonesia dalam periode 2001-2004 (tabel 3.2):

Tabel 3.2: Pengembangan Kekuatan Militer Indonesia periode 2001-2004

Man Power				
	2001	2002	2003	2004
Army	230.000	230.000	230.000	233.000
Navy	40.000	40.000	45.000	45.000
Air Force	27.000	27.000	27.000	24.000
Battle Tank				
MBT	0	0	0	0
lt tank	455	455	465	405
Armored Combat Vehicles				
AIFV	21	21	21	21
AAV	0	0	0	0
Assault Craft	0	0	0	0
APC	545	565	565	480
Large-Calibre Artillery System				

⁹ Sumber diolah dari berbagai literatur, seperti Pokja Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, *Konsepsi Postur Pertahanan Negara 2004-2014*, *loc. cit*; Alexandra R. Wulan (ed), *loc. cit*; Connie Rahakundini Bakrie, *loc. cit*

Towed Arty	381	381	221	283
SP Arty	0	0	0	0
MOR	876	876	876	876
ATGW	0	0	0	0
AD GUNS	420	470	470	568
Mine	12	12	12	11
Combat Aircraft				
Recce	168	168	168	175
FGA	84	59	59	63
Armed AC	0	0	0	0
AEW	0	0	0	0
STRIKE	0	0	0	0
MR	51	40	42	42
MPA	0	0	0	0
SURV	0	0	0	0
FTR	12	12	12	12
Aircraft Carrier	0	0	0	0
UAV	0	0	0	0
Attack Helicopter				
Armed Hel	18	17	17	17
Hel	144	120	96	98
Warships (including Submarine)				
Submarine	2	2	2	2
Frigate	17	17	17	16
Corvette	16	16	16	16
Missile Craft	4	4	4	4
Torpedo Craft	4	4	4	4
Patrol Craft	12	12	12	15
Amphibious	26	26	26	26
Missile and Missile Launcher				
RL	700	700	700	700
RCL	135	135	135	135
MRL	15	15	15	13
Missile	2	2	2	2
SAM	93	93	93	68

*Sumber diolah dari beberapa literatur, seperti: International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2000-2001*, London: Oxford University Press, 2000; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2002-2003*, London: Oxford University Press, 2002; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2003-2004*, London: Oxford University Press, 2003; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2004-2005*, London: Oxford University Press, 2004.¹⁰

¹⁰ International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2000-2001*, London: Oxford University Press, 2000; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2002-2003*, London: Oxford University Press, 2002; International Institute for International

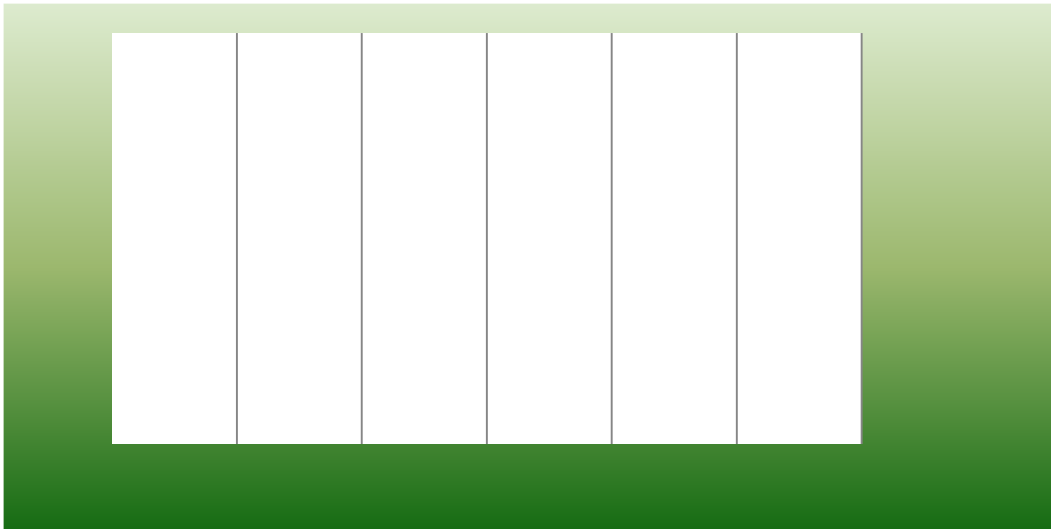
Pembangunan kekuatan militer Indonesia di atas dapat dikatakan tidak adanya peningkatan, baik kualitas dan kuantitas, yang berarti. Faktanya justru terdapat pengurangan jumlah alutsista yang termakan usia. Hal tersebut masih diperparah dengan makin berkurangnya beberapa alutsista lainnya yang tidak lagi dapat dipakai karena usia pakai yang sudah cukup lama, seperti jumlah helikopter dan pesawat tempur, dan alutsista kategori *Large-Caliber Artillery System* (jenis *Towed Arty*). Sementara kondisi alutsista lainnya tidak mengalami perubahan, bahkan kondisi alutsista semakin memprihatinkan. Beberapa kategori alutsista mengalami kemunduran kuantitas. Situasi tersebut membuat Indonesia hanya mampu untuk melakukan program pemeliharaan alutsista (*arms maintenance*). Pelaksanaan pemeliharaan alutsista tersebut dilakukan (1) perpanjangan usia pakai alutsista; (2) pengadaan alutsista baru atau rehabilitasi alutsista ditujukan hanya untuk kepentingan pengadaan materiil operasi; serta (3) pengadaan sarana komunikasi untuk meningkatkan komando pengendali (Kodal) di Mabes TNI dan satuan-satuan tempur TNI.¹¹ Pelaksanaan program tersebut tentu tidak, secara signifikan, meningkatkan kekuatan postur pertahanan Indonesia.

Dalam periode ini, selain terdapat pengurangan kuantitas alutsista, terdapat pula penambahan atau akuisisi persenjataan, namun penambahan jumlah alutsista tersebut tidak begitu mempengaruhi kekuatan alutsista yang ada. Kekuatan alutsista Indonesia di tahun 2004 tidak secara signifikan berbeda dengan posisi alutsista di tahun 2000. Berikut grafik akuisisi alutsista Indonesia (grafik 3.2):

Grafik 3.2: Jenis Akuisisi Alutsista Indonesia periode 2001-2004

Studies (IISS), *The Military Balance 2003-2004*, London: Oxford University Press, 2003; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2004-2005*, London: Oxford University Press, 2004

¹¹ Andi Widjanto, *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia*, loc. cit



*Sumber diolah dari beberapa literatur, seperti: International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2002-2003*, London: Oxford University Press, 2002; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2003-2004*, London: Oxford University Press, 2003.¹²

Tahun 2002, jumlah kekuatan alutsista Indonesia hanya bertambah pada kategori *Armored Combat Vehicles* (jenis APC) dua buah dan *Large-Calibre Artillery System* (jenis AD Guns) 50 buah. Penambahan alutsista ini tidak secara signifikan memperkuat kondisi militer. Tahun 2003, hanya terdapat akuisisi jumlah *1t tank* sebanyak 10 buah.

Secara keseluruhan kondisi alutsista yang memprihatinkan semakin memperjelas bahwa pengembangan kekuatan militer Indonesia sama sekali tidak merefleksikan ancaman dan persaingan yang ada. Pada kenyataannya, selain terdapat pengurangan jumlah alutsista yang sudah termakan usia, dan meski terdapat beberapa penambahan jumlah alutsista namun orientasi pengembangan kekuatan militer sama sekali tidak menyentuh pada alutsista yang mendukung Indonesia dalam melakukan operasi militer. Pengembangan alutsista yang dapat mendukung kemampuan operasi militer dan agresi tidak hanya harus memiliki kemampuan penangkalan juga kemampuan bertahan terhadap ekspansi negara lain. Kemampuan sebuah negara

¹² International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2002-2003*, London: Oxford University Press, 2002; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2003-2004*, London: Oxford University Press, 2003

dalam melakukan operasi militer perlu didukung oleh kesiapan alutsista yang mampu melakukan serangan balik atau *second strike*. Ketidakmampuan sebuah negara dalam melakukan *self-defense* dan menghadapi kekuatan musuh akan menjadi kelemahan yang akan memicu negara lain untuk melakukan ekspansi. Kesiapan alutsista yang mampu melakukan serangan balik tidak hanya harus mampu melakukan *self-defense* dalam melindungi kondisi geografis namun jenis alutsista yang mampu bersifat ekspansi jauh keluar batas nasional dan bersifat *mobile* sehingga dapat menimbulkan efek besar yang mempengaruhi kekuatan penangkal dari serangan musuh.

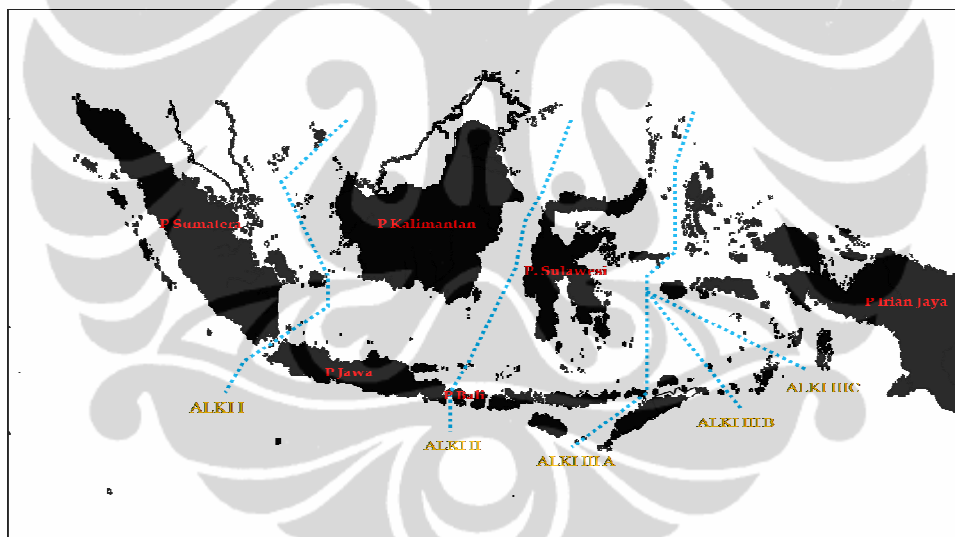
Pengembangan kekuatan militer perlu memperhatikan kemampuan yang mampu merefleksi lingkungan strategisnya, baik secara kuantitatif dan kualitatif. Pengembangan kekuatan militer Indonesia yang ada sama sekali belum menyentuh pada beberapa kategori alutsista yang dapat mendukung kemampuan dalam menghadapi ancaman dan persaingan. Pengembangan kekuatan militer Indonesia yang tidak merefleksi lingkungan strategisnya terlihat pada (lihat grafik 5), seperti *It tank*, *APC*, dan *AD Gun* yang tidak mampu mendukung kemampuan dalam menghadapi ancaman. Kategori alutsista yang mampu menghadapi ancaman dan persaingan adalah alutsista yang memiliki kemampuan dalam memproteksi kedaulatan dan teritorial dari ancaman eksternal dan memiliki kemampuan, baik penangkalan dan penyerangan. Pengembangan kekuatan militer Indonesia masih belum mengarah pada akuisisi persenjataan yang memiliki kemampuan *mobile* dan mempunyai jangkauan keluar batas nasional, seperti misil, *battle tank*, *combat aircraft*, dan *attack helicopter* yang dapat menangkal ancaman eksternal dan mendukung operasi militer.

1.2 Stagnasi Strategi Gelar Pasukan Indonesia periode 2001-2004

Secara geografis, wilayah kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) terdiri dari 17.508 pulau, menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan wilayah

laut, dengan garis pantai 81.000 km serta wilayah ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) seluas 4 juta km².¹³ Keadaan geografis ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jalur perlintasan mengingat fungsi laut sebagai jalur transportasi.¹⁴ Aktivitas perairan di laut yang cukup penting bagi masyarakat internasional membuat keamanan laut di Indonesia menjadi faktor vital dalam keamanan mengingat wilayah perairan Indonesia digunakan sebagai jalur lalu lintas laut internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia, ALKI). Hal tersebut masih ditambah dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki 4 dari 9 *choke points*¹⁵ di dunia yang sangat vital sebagai jalur transportasi laut untuk perdagangan dan jalur minyak, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Ombai Wetar. Karena itu, secara geopolitik, kondisi nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis. Berikut peta penjelasan yang menggambarkan wilayah Indonesia yang menjadi Alur Laut Kepulauan Indonesia (gambar 3.1):

Gambar 3.1: Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



*Sumber diolah dari Andi Widjajanto, *Strategi Pertahanan Negara*, 2006.¹⁶

¹³ Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003, *loc. cit*; Pokja Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, *Konsep Postur Pertahanan Negara 2004-2014*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Sembilan *choke points* tersebut adalah Selat Bab El Mandeb, Hormuz, Gibraltar, Suez, Terusan Panama, Malaka, Sunda, Lombok, dan Ombai Wetar.

¹⁶ Andi Widjajanto, *Strategi Pertahanan Negara*, 2006

Kondisi geografis Indonesia yang sangat vital memerlukan sebuah penanganan gelar pasukan militer yang mampu mencerminkan kemampuan Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Dalam hal ini, gelar pasukan dianggap sebagai strategi pertahanan yang mengacu pada kondisi geografis dan jumlah prajurit atau pasukan sebuah negara. Variasi penempatan gelar pasukan menentukan kapabilitas sebuah negara untuk merespon ancaman eksternal. Signifikansi strategi gelar pasukan memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan apakah sebuah negara siap dalam menghadapi ancaman dari negara lain.¹⁷ Adanya persamaan sumber kekuatan anatr negara belum tentu memberikan ruang gerak pada salah satu negara untuk mampu menghadapi ancaman dan persaingan dengan negara lain, namun pengimplementasian strategi gelar pasukan akan secara signifikan mempengaruhi kemampuan dan kesiapan sebuah negara untuk menghadapi serangan dari luar.¹⁸ Hal tersebut mempengaruhi kesiapan suplai, komando, komunikasi, dan sistem transportasi yang menentukan pergerakan strategi pasukan.¹⁹ Pada periode 2001, jumlah prajurit, dari semua matra, yang dimiliki Indonesia berjumlah 297.000. Jumlah ini belum mencukupi untuk melakukan pengamanan terhadap kondisi teritorial Indonesia, mengingat begitu banyaknya pulau-pulau terluar yang ada. Tahun berikutnya, jumlah prajurit yang ada tidak mengalami peningkatan. Peningkatan prajurit hanya dilakukan pada tahun 2003 dan itupun hanya bertambah sekitar 5000 prajurit atau total prajurit yang ada berjumlah 302.000. Pada tahun 2004, jumlah pasukan matra darat mengalami kenaikan namun matra udara mengalami penurunan, sehingga kondisi total jumlah pasukan tidak mengalami perubahan (lihat tabel 3.2). Jumlah prajurit yang ada juga sangat menentukan strategi gelar pasukan. Gelar pasukan terdiri atas tiga matra, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Matra Angkatan Darat terbagi atas kekuatan terpusat yaitu KOSTRAD (Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat) dan KOPASSUS (Komando Pasukan Khusus), kekuatan kewilayahan yaitu KODAM (Komando Daerah Militer), dan kekuatan pendukung yaitu KOREM (Komando Resor Militer) dan KODIM (Komando Distrik Militer). Sedangkan matra Angkatan Laut terbagi

¹⁷ Stephen Biddle, *Rebuilding the Foundation of Ofense-Defense Theory*, The Journal of Politics, Vol. 63, No. 3 (August., 2001), hal. 743

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hal. 752

atas Kekuatan Armada yaitu Armada Barat dan Armada Timur dan Pangkalan TNI AL. Matra Angkatan Udara terbagi atas Skadron Udara dan Kosek. Berikut penjelasan gelar pasukan (tabel 3.3):

Tabel 3.3: Gelar Pasukan Militer Indonesia periode 2001-2004

Tahun	Satuan	Divisi	Jumlah	Gelar Pasukan
2001	AD	KOSTRAD	2	Pulau Jawa dan Sulawesi
		KOPASSUS	1	Pulau Jawa
		KODAM	12	<ul style="list-style-type: none"> • 3, Sumatera (didukung oleh 7 KOREM) • 4, Pulau Jawa (didukung oleh 14 KOREM) • 1, Kalimantan (didukung oleh 4 KOREM) • 1, Sulawesi (didukung oleh 5 KOREM) • Bali, NTB, NTT digelar 1 (didukung oleh 3 KOREM) • 1, Kepulauan Maluku (didukung oleh 2 KOREM)

				<ul style="list-style-type: none"> • 1, Papua (didukung oleh 4 KOREM)
AU	SKADRON	7	<ul style="list-style-type: none"> • 1, Sumatera • 4, Jawa • 1, Sulawesi • 1, Kalimantan 	
	KOSEK/SATRAD	4	<ul style="list-style-type: none"> • 1, Jakarta • 1, Makassar • 1, Medan • 1, Biak 	
AL	ARMADA BARAT	1	Teluk Ratai, Jakarta	
	ARMADA TIMUR	1	Surabaya	
	PANGKALAN UTAMA TNI AL	11	Belawan, Padang, Tanjung Pinang, Jakarta, Surabaya, Makassar, Kupang, Bitung, Ambon Jayapura, dan Marauke	

2002	AD	KOSTRAD	2	Pulau Jawa dan Sulawesi
		KOPASSUS	1	Pulau Jawa
		KODAM	12	<ul style="list-style-type: none"> • 3, Sumatera (didukung oleh 7 KOREM) • 4, Pulau Jawa (didukung oleh 14 KOREM) • 1, Kalimantan (didukung oleh 4 KOREM) • 1, Sulawesi (didukung oleh 5 KOREM) • Bali, NTB, NTT digelar 1 (didukung oleh 3 KOREM) • 1, Kepulauan Maluku (didukung oleh 2 KOREM) • 1, Papua (didukung oleh 4 KOREM)

	AU	SKADRON	7	<ul style="list-style-type: none"> • 1, Sumatera • 4, Jawa • 1, Sulawesi • 1, Kalimantan
		KOSEK/SATRAD	4	<ul style="list-style-type: none"> • 1, Jakarta • 1, Makassar • 1, Medan • 1, Biak
	AL	ARMADA BARAT	1	Teluk Ratai, Jakarta
		ARMADA TIMUR	1	Surabaya
PANGKALAN UTAMA TNI AL		11	Belawan, Padang, Tanjung Pinang, Jakarta, Surabaya, Makassar, Kupang, Bitung, Ambon Jayapura, dan Marauke	
2003	AD	KOSTRAD	2	Pulau Jawa dan Sulawesi
		KOPASSUS	1	Pulau Jawa
		KODAM	12	<ul style="list-style-type: none"> • 3, Sumatera (didukung oleh 7

				<p>KOREM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4, Pulau Jawa (didukung oleh 14 KOREM) • 1, Kalimantan (didukung oleh 4 KOREM) • 1, Sulawesi (didukung oleh 5 KOREM) • Bali, NTB, NTT digelar 1 (didukung oleh 3 KOREM) • 1, Kepulauan Maluku (didukung oleh 2 KOREM) • 1, Papua (didukung oleh 4 KOREM)
	AU	SKADRON	7	<ul style="list-style-type: none"> • 1, Sumatera • 4, Jawa • 1, Sulawesi

				<ul style="list-style-type: none"> • 1, Kalimantan
		KOSEK/SATRAD	4	<ul style="list-style-type: none"> • 1, Jakarta • 1, Makassar • 1, Medan • 1, Biak
	AL	ARMADA BARAT	1	Teluk Ratai, Jakarta
		ARMADA TIMUR	1	Surabaya
		PANGKALAN UTAMA TNI AL	11	Belawan, Padang, Tanjung Pinang, Jakarta, Surabaya, Makassar, Kupang, Bitung, Ambon Jayapura, dan Marauke
2004	AD	KOSTRAD	2	Pulau Jawa dan Sulawesi
		KOPASSUS	1	Pulau Jawa

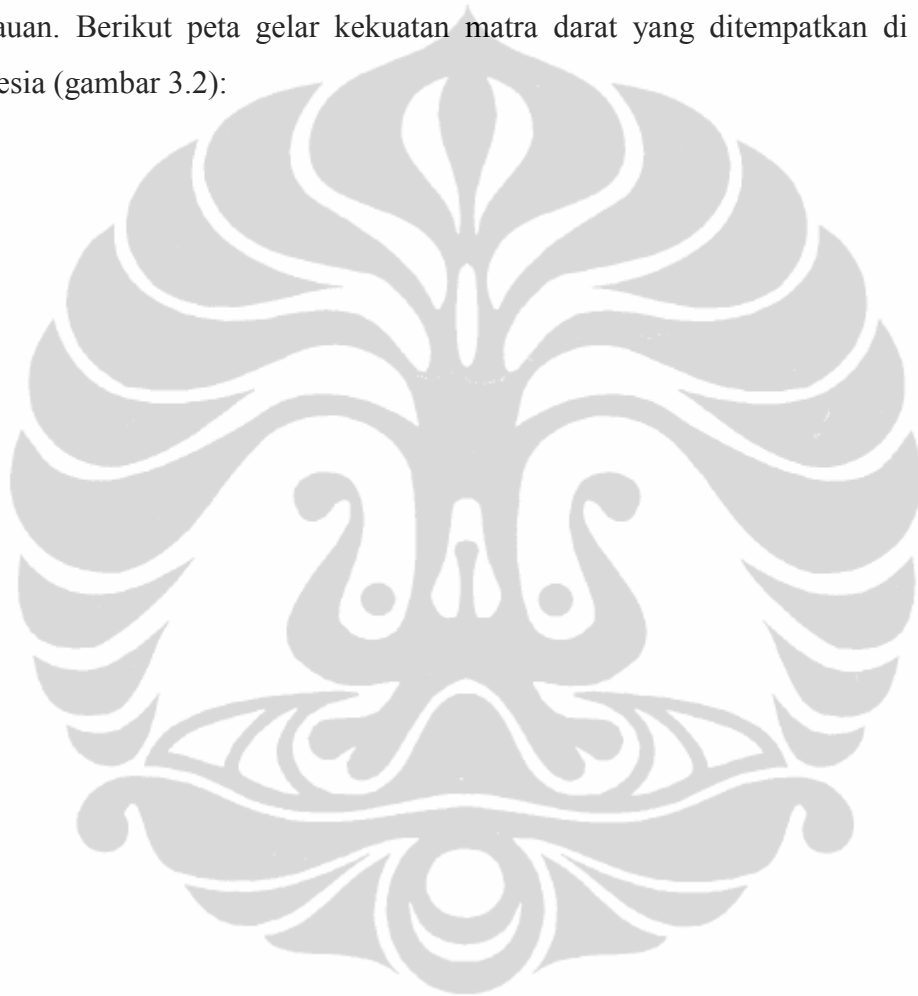
		KODAM	12	<ul style="list-style-type: none"> • 3, Sumatera (didukung oleh 7 KOREM) • 4, Pulau Jawa (didukung oleh 14 KOREM) • 1, Kalimantan (didukung oleh 4 KOREM) • 1, Sulawesi (didukung oleh 5 KOREM) • Bali, NTB, NTT digelar 1 (didukung oleh 3 KOREM) • 1, Kepulauan Maluku (didukung oleh 2 KOREM) • 1, Papua (didukung oleh 4 KOREM)
	AU	SKADRON	7	<ul style="list-style-type: none"> • 1, Sumatera • 4, Jawa

				<ul style="list-style-type: none"> • 1, Sulawesi • 1, Kalimantan
		KOSEK/SATRAD	4	<ul style="list-style-type: none"> • 1, Jakarta • 1, Makassar • 1, Medan • 1, Biak
	AL	ARMADA BARAT	1	Teluk Ratai, Jakarta
		ARMADA TIMUR	1	Surabaya
		PANGKALAN UTAMA TNI AL	11	Belawan, Padang, Tanjung Pinang, Jakarta, Surabaya, Makassar, Kupang, Bitung, Ambon Jayapura, dan Marauke

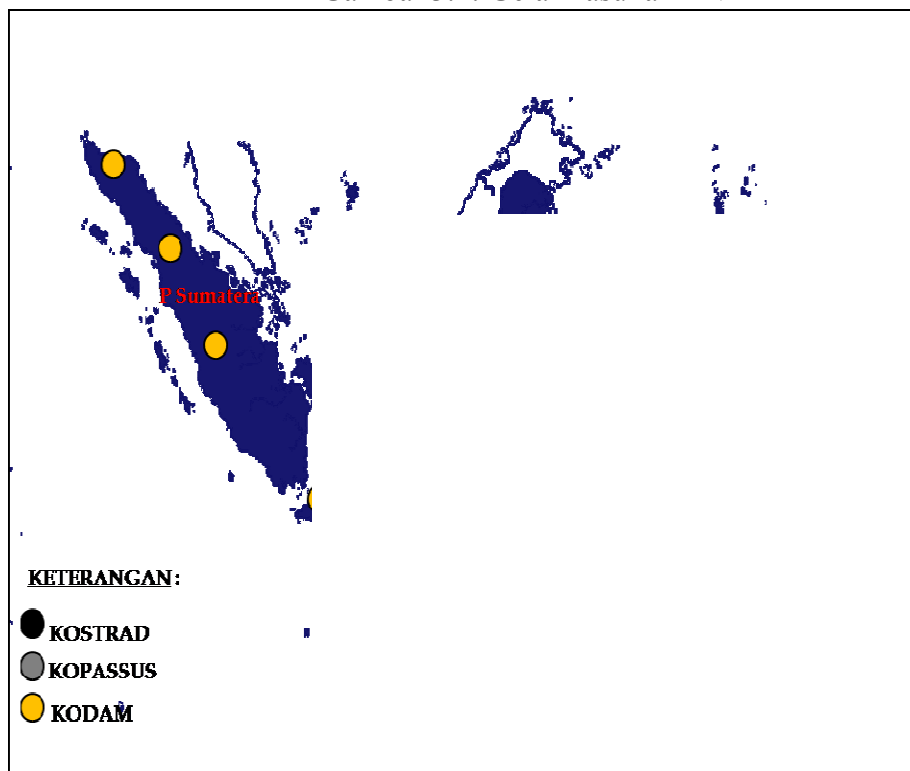
*Sumber diolah dari International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2000-2001*, London: Oxford University Press, 2000; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2002-2003*, London: Oxford University Press, 2002; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2003-2004*, London: Oxford University Press, 2003; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2004-2005*, London: Oxford University Press, 2004; Pokja Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, *Konsepsi Postur Pertahanan Negara 2004-2014*.²⁰

²⁰ International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2000-2001*, London: Oxford University Press, 2000; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2002-2003*, London: Oxford University Press, 2002; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2003-2004*, London: Oxford University Press, 2003; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2004-2005*, London: Oxford University Press, 2004; Pokja Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, *Konsepsi Postur Pertahanan Negara 2004-2014*

Data kuantitatif di atas menjelaskan gelar pasukan Indonesia selama periode 2001-2004. Gelar pasukan ini merupakan bagian postur pertahanan. Data tersebut menunjukkan beberapa uraian yang menjelaskan bahwa gelar pasukan selama periode 2001-2004 sama sekali tidak menunjukkan adanya perubahan strategi gelar pasukan untuk merefleksi situasi di luar kawasan. Gelar pasukan tidak menunjukkan bahwa penyebaran atau gelar pasukan di tiap mata mampu menyesuaikan dengan ancaman eksternal dan keadaan geografis Indonesia yang lebih dikenal sebagai negara kepulauan. Berikut peta gelar kekuatan mata darat yang ditempatkan di wilayah Indonesia (gambar 3.2):



Gambar 3.2: Gelar Pasukan TNI AD



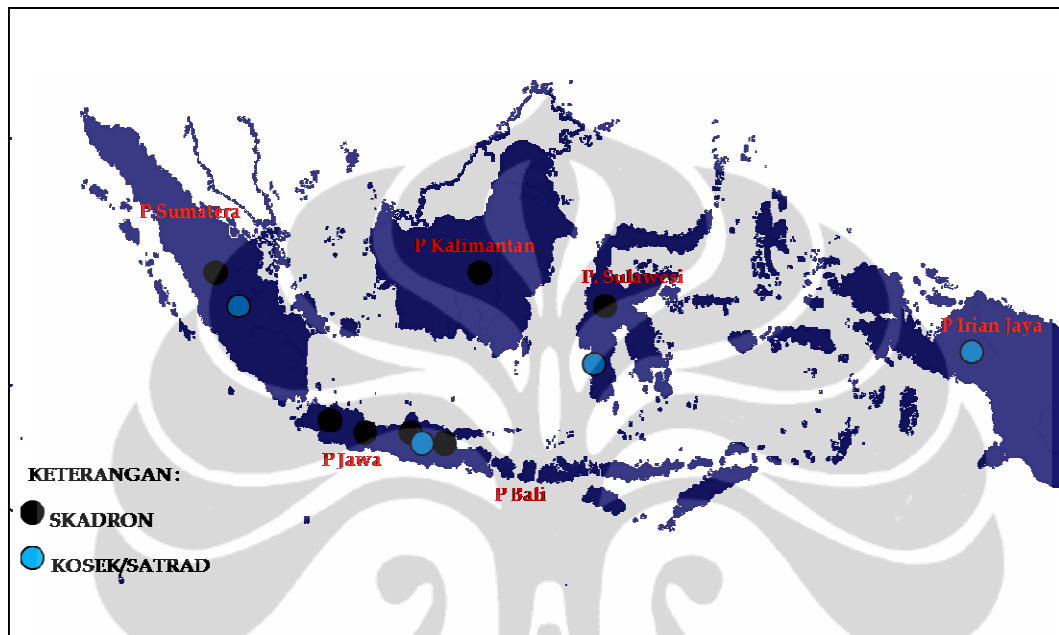
Sumber diolah dari beberapa literatur, seperti: International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2001*, London: Oxford University Press, 2000; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2002-2003*, London: Oxford University Press, 2002; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2003-2004*, London: Oxford University Press, 2003; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2004-2005*, London: Oxford University Press, 2004; Pokja Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, *Konsep Postur Pertahanan Negara 2004-2014*.²¹

Gelar kekuatan matra AD pada peta gelar pasukan di atas menunjukkan penempatan kekuatan matra darat belum meliputi keseluruhan geografis Indonesia yang cukup luas. Situasi ini juga belum sama sekali merefleksikan penempatan pasukan pada kondisi ancaman yang ada. Hal tersebut menunjukkan dengan kondisi gelar pasukan yang belum merefleksikan kondisi geografis ancaman eksternal sebagai variabel yang seharusnya mempengaruhi strategi sebuah negara.

²¹ International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2000*, London: Oxford University Press, 2000; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2002-2003*, London: Oxford University Press, 2002; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2003-2004*, London: Oxford University Press, 2003; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2004-2005*, London: Oxford University Press, 2004; Pokja Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, *Konsep Postur Pertahanan Negara 2004-2014*.

Hal yang sama terjadi pada kekuatan udara. Bentuk penyebaran pasukan udara yang difungsikan sebagai *surveillance* belum memenuhi kapabilitas yang disesuaikan dengan keadaan geografis Indonesia dan ancaman eskternal. Berikut pula peta gelar pasukan matra udara (gambar 3.3):

Gambar 3.3: Gelar Pasukan AU



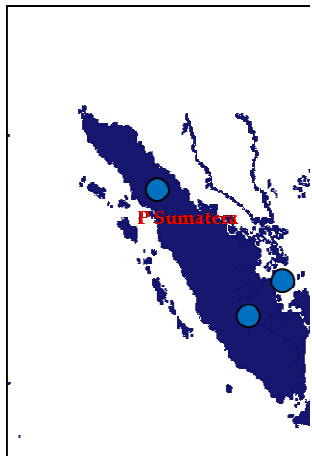
Sumber diolah dari beberapa literatur, seperti: International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2000-2001*, London: Oxford University Press, 2000; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2002-2003*, London: Oxford University Press, 2002; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2003-2004*, London: Oxford University Press, 2003; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2004-2005*, London: Oxford University Press, 2004; Pokja Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, *Konsepsi Postur Pertahanan Negara 2004-2014*.²²

Kekuatan udara pada peta gelar pasukan di atas terlihat tidak mengarah pada penyebaran pasukan matra udara yang dapat memiliki kemampuan penyebaran pasukan untuk mendukung tingkat pengawasan, baik dukungan terhadap matra lain

²² International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2000-2001*, London: Oxford University Press, 2000; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2002-2003*, London: Oxford University Press, 2002; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2003-2004*, London: Oxford University Press, 2003; International Institute for International Studies (IISS), *The Military Balance 2004-2005*, London: Oxford University Press, 2004; Pokja Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, *Konsepsi Postur Pertahanan Negara 2004-2014*

maupun kemampuan ini
belum maksimal dalam

Kondisi serupa
pasukan yang juga tidak
acuan dasar dalam peng
matra laut (gambar 3.4):



Sumber diolah dari beberapa literatur
2001, London: Oxford University
2002-2003, London: Oxford Univer
2003-2004, London: Oxford Univer
2004-2005, London: Oxford Univer
Negara 2004-2014.²³

Hal serupa juga
disesuaikan dengan ko

²³ International Institute for
Oxford University Press, 20
Balance 2002-2003, London
Studies (IISS), *The Military*,
Institute for International Stu
Press, 2004; Pokja Puslitbar
2014

matra ini tidak memiliki kapabilitas yang mampu menciptakan situasi penangkalan terhadap adanya gangguan.

Pada ketiga matra di atas, gelar pasukan paling banyak ditempatkan di wilayah Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Gelar pasukan justru tidak diorientasikan atau diutamakan di wilayah-wilayah bagian luar (pulau-pulau terluar Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif, serta wilayah perairan yang menjadi *choke points* bagi kepentingan internasional) dan wilayah-wilayah perbatasan, seperti wilayah ujung utara (Kalimantan), wilayah ujung barat (Aceh) atau wilayah ujung timur Indonesia (Marauke). Situasi ini juga dipersulit dengan kondisi jumlah divisi yang terlalu sedikit jika dikaitkan dengan luas wilayah perairan dan darat Indonesia dan tidak adanya *balancing* kekuatan dan keterpaduan antarmatra (AD, AL, dan AU) dalam melakukan operasi militer, bahkan orientasi gelar pasukan justru tidak ditekankan pada fungsi operasionalisasi AL dan AU sebagai matra yang memiliki kapabilitas untuk melindungi wilayah teritorial terluar Indonesia. Situasi ini merefleksikan kemampuan strategis Indonesia yang tidak diorientasikan untuk menghadapi ancaman eksternal.

Secara normatif, strategi ini ditujukan untuk mengaplikasikan kekuatan militer demi tujuan-tujuan politik melalui gelar pasukan yang ditempatkan pada wilayah-wilayah penting atau *hot spot area* dengan didukung kualitas dan kuantitas divisi yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan strategis dan faktor geografis untuk menciptakan penyelenggaraan operasi militer yang memberikan efek penangkalan terhadap ancaman sebagai bagian dari kepentingan politik dan kedaulatan negara. Faktanya, situasi tersebut memperlihatkan strategi gelar yang belum memberikan pengaruh signifikan bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman dan persaingan eksternal. Situasi ini menghambat kemampuan gelar pasukan Indonesia untuk kemampuan menciptakan komando, komunikasi dan sistem transportasi pasukan yang mengarah pada kesiapan untuk menghadapi situasi di luar kawasan. Hal ini mencerminkan bahwa strategi gelar pasukan Indonesia masih

bersifat defensif atau *inward-looking* karena masih belum merefleksi lingkungan strategis dan keadaan geografisnya.

1.3 Stagnasi Arah Kebijakan Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Membangun Hubungan Antarnegara dalam Kerangka Pengaturan Keamanan periode 2001-2004

Diplomasi merupakan langkah kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Karena itu, diplomasi dapat difungsikan sebagai alat politik untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam periode 2001-2004, implementasi diplomasi Indonesia dalam bidang pertahanan yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan bernegara yang mengarah pada bentuk kerjasama dan perjanjian untuk menghadapi atau merefleksi ancaman-ancaman dan persaingan di luar batas nasional. Langkah diplomasi Indonesia mengarah pada interaksi kerjasama dan latihan militer dengan negara-negara tetangga sebagai bentuk respon atas ancaman kejahatan lintas batas. Berikut tabel beberapa kerjasama dan perjanjian pertahanan yang diimplementasikan dalam kerangka diplomasi pertahanan Indonesia pada periode 2001-2004 (tabel 3.4):

Tabel 3.4: Diplomasi Kerjasama dan Perjanjian Pertahanan Indonesia dengan beberapa Negara di Kawasan Asia Tenggara

Negara	Jenis Diplomasi
Singapura	Latihan Bersama antarmatra: matra Angkatan Darat (SAFKAR-INDOPURA), Angkatan Laut (EAGLE-INDOPURA), dan Angkatan Udara (ELANG INDOPURA), serta perjanjian MTA (Military Training Area)
Malaysia	Komite Perbatasan: Penanganan Isu Di Wilayah Perbatasan dan Latihan Militer: Malindo, Malindo Jaya, Elang Malindo, Amanmalindo, dan Drasasa yang

	ditujukan untuk menghadapi isu-isu non-konvensional.
Filipina	Bilateral Fishing Access Agreement
ASEAN (Indonesia, Malaysia, dan Filipina)	Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing
Filipina	Forum JBC (Joint Commission for Bilateral Cooperation) untuk menghadapi isu-isu non-konvensional
Brunei Darussalam	Latihan Militer Bersama

*Sumber diolah dari beberapa literatur, seperti Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia, *Indonesia: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21, 2003*; APEC Fisheries Working Group, *Case Study on the Impact of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Sulawesi Sea, April 2008*.²⁴

Kebijakan Indonesia lainnya dilaksanakan dalam kerangka diplomasi sebagai langkah untuk meningkatkan keamanan nasional dan regional dimulai dari inisiatif Indonesia pada tahun 2003 dalam membentuk sebuah komunitas keamanan (*security community*) dalam kerangka ASEAN yang akan dicapai pada tahun 2015. Komunitas keamanan ini atau *security community* ini merupakan salah satu pilar ASEAN Community yang berperan dalam bidang keamanan (ASEAN Security Community/ASC), selain bidang ekonomi (ASEAN Economic Community/AEC) dan sosial-budaya (ASEAN Social-Cultural Community/ASCC). ASC dibentuk melalui penandatanganan Kesepakatan Bali II (Bali Concord II) pada tahun 2003 untuk mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam ASEAN, yaitu mewujudkan perdamaian, stabilitas, demokrasi, dan kesejahteraan di kawasan. ASC dilaksanakan dalam lima arah strategi yang termaktub dalam ASC Plan of Action, yaitu perkembangan politik (*political development*), bersama-sama membentuk norma (*shaping and sharing of norms*), pencegahan konflik (*conflict prevention*),

²⁴ Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003, *loc. cit*; APEC Fisheries Working Group, *Case Study on the Impact of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Sulawesi Sea, April 2008*.

penyelesaian konflik (*conflict resolution*), dan membangun perdamaian pasca konflik (*post-conflict peace building*).²⁵

Pembentukan *security community* ini tidak terlepas dari pandangan masing-masing negara di kawasan ini yang menginginkan adanya perdamaian dan penyelesaian konflik tanpa menggunakan kekuatan militer antara negara-negara anggota. Situasi ini merupakan proses interaksi antarnegara yang setidaknya dapat mengembangkan kerjasama interdependensi yang saling menguntungkan. Kerjasama ini juga dapat dikatakan sebagai proses sosial dimana negara-negara yang terlibat mampu untuk meredefinisikan kepentingan antaraktor yang mengarah pada terjadinya perang atau perdamaian melalui pengembangan dan pencitraan institusi, norma dan identitas yang terintegrasi dalam interaksi komunitas keamanan antar negara anggota.²⁶ Ketiga hal itu (institusi, norma, dan identitas) dapat dicapai jika masing-masing negara dapat bekerjasama dalam menyatukan nilai-nilai transnasional kesemua anggota (*the spread of transnasional values*), melakukan pengembangan pemahaman bersama (*the development of shared understanding*), dan menciptakan rasa saling percaya (*generation of mutual trust*), sehingga pemaknaan kekuatan militer sebagai *problem solving* bersifat *illegitimate*, atau tidak adanya kecenderungan kompetisi pengembangan kekuatan militer atau perlombaan senjata di antara negara-negara anggota komunitas keamanan.²⁷

Kebijakan diplomasi Indonesia dalam kerangka ASC mencerminkan tidak adanya perubahan pandangan dalam melihat atmosfer konfliktual yang ada di kawasan. Dukungan diplomasi yang diarahkan dalam membentuk ASC memperlihatkan usaha pertahanan melalui diplomasi masih belum diarahkan pada pentingnya mekanisme diplomasi dalam menyelesaikan berbagai konflik kedaulatan yang ada. Tidak adanya pandangan dalam menyelesaikan konflik mencerminkan tidak adanya keinginan kuat bagi Indonesia untuk berusaha bersikap tegas dalam

²⁵ ASEAN Security Community diakses melalui <http://www.aseansec.org/AR05/PR-Peace.pdf>

²⁶ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, USA: New York, 2001

²⁷ *Ibid*

menyelesaikan permasalahan teritorial dengan negara-negara tetangga. Dukungan dalam membentuk ASC di kawasan menggambarkan bahwa arah diplomasi pertahanan Indonesia masih belum memandang konflik kedaulatan sebagai ancaman yang harus disikapi secara serius demi mempertahankan wilayah kedaulatan dengan merespon atau merefleksi adanya gangguan-gangguan dari negara-negara lain.

Realitas interaksi antarnegara di Asia Tenggara masih diwarnai konflik klaim teritorial antarnegara. Konflik antara Thailand dan Myanmar, serta Malaysia dan Singapura, atau Indonesia sendiri yang memiliki berbagai permasalahan perbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, merupakan perbedaan kepentingan dalam hubungan politik dan kedaulatan negara-negara di kawasan ini. Permasalahan-permasalahan yang muncul yang cenderung melahirkan suasana kompetisi dalam mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Hal ini terlihat pada sifat kebijakan luar negeri masing-masing negara yang cenderung bersifat individu. Situasi ini menjadi pilihan sulit bagi negara-negara tersebut untuk melahirkan kepentingan bersama dalam mencapai stabilitas.

Konflik klaim teritorial antarnegara, seperti permasalahan tapal batas maupun klaim kepemilikan wilayah merupakan ciri interaksi hubungan di kawasan Asia Tenggara. Konflik antara Indonesia dan Malaysia, hubungan antara Singapura dan Malaysia, serta interaksi negara-negara lainnya diwarnai adanya kepentingan kedaulatan yang tidak kunjung selesai. Hubungan ini tentu saja menjadi pemicu kecurigaan masing-masing negara atas sikap negara satu terhadap negara lainnya. Berikut tabel yang menjelaskan situasi konflik yang menjadi karakter hubungan di Asia Tenggara (tabel 3.5):

Tabel 3.5: Konflik Teritorial di Wilayah Perbatasan antara Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara

Keterlibatan Konflik	Jenis Konflik
Indonesia-Singapura	Konflik Penambangan Pasir Laut di Perairan sekitar Kepulauan Riau yang mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai
Indonesia-Malaysia	Konflik penentuan batas maritim di wilayah perairan Selat Malaka dan perbatasan darat di Kalimantan
Indonesia-Filipina	Konflik batas maritim di perairan utara dan selatan Pulau Miangas
Indonesia-Vietnam	Konflik wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore

*Sumber diolah dari Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003, *Indonesia: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*.²⁸

Atmosfer konflik ini membuat masing-masing negara bersikap rasional dengan tidak melakukan kerjasama namun sebaliknya masing-masing negara cenderung bersikap individu dalam melihat kepentingan politik dan kedaulatannya masing-masing. Situasi ini tidak terlepas dari kecurigaan satu negara terhadap negara lainnya yang terlibat dalam konflik kepentingan dan klaim teritorial. Inisiatif dalam membangun rasa percaya satu sama lain hanya terimplementasi ketika terciptanya *common interest* untuk tidak saling melakukan intervensi terhadap permasalahan domestik satu sama lain dan kerjasama untuk menghadapi ancaman transnasional saja. Situasi ini diperparah dengan adanya perselisihan wilayah laut dan letak geografis kawasan ini sangat strategis bagi kepentingan berbagai aktor serta berbagai kepentingan negara-negara besar di luar kawasan dalam mencari *power* di luar batas nasional dan memaksakan nilai-nilai ideologi yang dianut untuk melalui tindakan

²⁸ Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003, *loc. cit*

intervensi untuk menyebarkan pengaruhnya kepada negara lain yang menjadi ciri persaingan atas dasar nilai kedaulatan dan kepentingan nasional.

Perbedaan kepentingan dan pemaknaan kedaulatan memicu terciptanya pandangan dan pendekatan militeristik sebagai bentuk penyelesaian melalui pengembangan kemampuan persenjataan. Hal ini disebabkan oleh ciri hubungan yang masih diselimuti rasa curiga masing-masing negara, terutama ketika konflik terjadi menyangkut isu-isu kedaulatan, yang mengakibatkan sulitnya melakukan kerjasama untuk menciptakan sebuah *common interest*. Selain itu, belum siapnya ASEAN dalam kerangka ASC yang ditujukan sebagai institusi yang mampu menyelesaikan konflik antarnegara, sehingga konflik yang tercipta membuat hubungan antarnegara dalam situasi *status quo*. Pola interaksi yang ada sama sekali tidak mengarah pada optimisme dalam melakukan kerjasama. Hubungan yang tercipta lebih mengarah pada bentuk persaingan kepentingan nasionalnya masing-masing dari pada terciptanya kepentingan bersama.

Peranan diplomasi Indonesia (lihat tabel 3.5) dalam kurun waktu 2001-2004 terlihat masih dan hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan non-konvensional saja. Diplomasi belum mengarah pada pentingnya tindakan fungsi diplomasi sebagai garis depan dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan teritorial sebagai isu-isu yang jauh lebih sensitif, lebih jauh, peranan diplomasi masih belum melihat berbagai persaingan antarnegara dalam mencapai dan menjaga kepentingan nasional. Diplomasi yang ada cenderung dilaksanakan hanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu saja. Dalam kasus tertentu, diplomasi Indonesia dalam membentuk ASC memang belum memperlihatkan hasil positif mengingat implementasi dan peranan ASC masih belum terlihat, namun selama periode 2001-2004 terlihat bahwa arah kebijakan diplomasi Indonesia masih belum mengalami refleksi perubahan. Peranan ASC akan menjadi lebih penting jika institusi tersebut mampu menjembatani kepentingan nasional masing-masing negara sehingga konflik teritorial yang ada mampu diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak luar, namun pada kenyataannya, adanya berbagai konflik, terutama permasalahan

kedaulatan justru tidak menjadi prioritas utama bagi ASC untuk menciptakan stabilitas di kawasan, selain ketidaksiapan institusi tersebut dalam menjalankan peranannya sebagai forum regional. Secara normatif, kebijakan diplomasi yang dijalankan bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional, terutama kepentingan dalam mempertahankan wilayah kedaulatan, bukan hanya kerjasama yang ditujukan untuk menghadapi tindakan kejahatan transnasional saja. Hal tersebut mencerminkan kebijakan diplomasi Indonesia tidak merefleksikan realitas lingkungan strategisnya.

Dalam hal ini, diplomasi Indonesia, baik secara bilateral maupun regional, yang ditujukan untuk mendukung terciptanya sebuah kerjasama keamanan yang tidak menekankan pada realitas hubungan antarnegara. Pada akhirnya, usaha diplomasi yang ditujukan untuk meningkatkan pertahanan negara yang justru bersifat masih bersifat defensif dalam menjalankan fungsi diplomasinya yang ditujukan sebagai langkah keamanan dan pertahanan. Kondisi interaksi antarnegara yang diwarnai konflik kepentingan dan kedaulatan, justru tidak menjadi prioritas diplomasi pertahanan. Selain itu, tidak adanya langkah *balancing* yang mampu mendukung kebijakan politik Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional.

Selain itu, tingkat kecurigaan satu negara terhadap negara lain tetap menjadi ciri hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara dan membuat hubungan kerjasama sulit dilakukan. Secara normatif, Indonesia perlu melakukan diplomasi yang mencerminkan sikap responsif yang mengarah pada tindakan proteksi untuk menjaga wilayah kedaulatan dan usaha *balancing* dengan melakukan identifikasi negara-negara yang memiliki dan tidak memiliki konflik kepentingan dan kedaulatan dengan Indonesia. Identifikasi ini akan menentukan diplomasi Indonesia yang diarahkan untuk mencapai hubungan yang *bandwagoning* dengan negara-negara yang tidak memiliki *clash* kepentingan dengan Indonesia sebagai bentuk *balancing*, sehingga arah diplomasi Indonesia dapat ditujukan untuk memperkuat keamanan dan pertahanan negara.

3.4 Kesimpulan

Dukungan anggaran pertahanan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan alokasi anggaran negara-negara lain di kawasan sangat mempengaruhi kondisi alutsista. Tidak adanya progres teknologi yang diadaptasi Indonesia untuk kepentingan strategi militer dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun postur pertahanan, baik sebagai proteksi, mobilitas, komunikasi, dan intelijen menggambarkan bahwa pengembangan postur pertahanan Indonesia memang tidak merefleksi perubahan lingkungan strategis. Hal tersebut masih diperparah dengan semakin berkurangnya kuantitas alutsista yang sudah termakan usia dan orientasi pengembangan kekuatan militer sama sekali tidak menyentuh pada teknologi alutsista yang mendukung Indonesia dalam melakukan operasi militer sebagai bentuk respon atau refleksi terhadap ancaman eksternal dan persaingan.

Secara geografis, implementasi gelar pasukan sebagai strategi demi tujuan-tujuan politik melalui penempatan kekuatan yang ditempatkan pada wilayah-wilayah penting belum didukung kualitas dan kuantitas divisi yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan strategis dan faktor geografis, sehingga belum terciptanya penyelenggaraan operasi militer yang dapat memberikan efek penangkalan terhadap ancaman sebagai bagian dari kepentingan politik dan kedaulatan negara. Dengan kata lain, strategi gelar pasukan Indonesia tidak merefleksi lingkungan strategis dan keadaan geografisnya.

Selain itu, kemampuan diplomasi Indonesia yang sama sekali tidak beranjak pada fungsi diplomasi untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara yang diarahkan untuk melindungi kedaulatan wilayah dan usaha *balancing* untuk mencapai tujuan-tujuan politik di kawasan. Dengan kata lain, diplomasi pertahanan Indonesia tidak merefleksi lingkungan strategisnya.